

Berita : Emil Terima Rp 10,2 Miliar  
Entitas / Cakupan : Kota Bandung  
Sumber / Hal : Tribun Jabar/Hal.5  
Edisi : Rabu, 18 Oktober 2017

# Emil Terima Rp 10,2 Miliar

## Kejaksaan Kembalikan Barang Bukti Kasus Korupsi Bansos kepada Pemkot Bandung

**BANDUNG, TRIBUN** - Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, menerima uang tunai, giro, dan cek senilai Rp 10,2 miliar dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bandung, Agus Winoto, di Pendopo Kota Bandung, Selasa (17/10).

Uang tersebut merupakan hasil rampasan dari kasus korupsi bantuan sosial (bansos) dan dana hibah tahun 2010-2012. Barang bukti perkara tindak pidana korupsi tersebut terdiri dari uang tunai Rp1 miliar dan 25 ribu dolar Amerika, serta cek giro senilai Rp 8.240.225.000, sehingga totalnya senilai Rp 10,2 miliar.

Menurut Agus Winoto, kasus tersebut sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap, sehingga sudah menjadi keharusan dari kejaksaan untuk mengembalikan barang bukti tersebut ke kas negara. Dikarenakan kasusnya terjadi di Pemkot Bandung, maka yang berhak menerima Pemkot Bandung. "Uang sebesar itu merupakan hasil sitaan dari tujuh terpidana yang sedang menjalani hukuman," ujar Agus, kemarin.

Ketujuh terpidana tersebut di antaranya dijatuhi hukuman 5 sampai 7 tahun. Mereka yakni Luftan Barkah, Rohman, Yanos

”Barang bukti masuk ke dalam pendapatan lain-lain yang sah. Peruntutannya akan dibahas bersama DPRD Kota Bandung, tentunya untuk anggaran murni 2018 menutupi defisit.”

**RIDWAN KAMIL**  
Wali Kota Bandung

Septiadi, Hafidz Kurnia, Uus Ruslan, Ahmad Mulyana, dan Firman Mulyana.

Ridwan Kamil mengatakan uang yang diterimanya langsung masuk kas daerah dan peruntutannya sesuai regulasi yang ada. "Barang bukti masuk ke dalam pendapatan lain-lain yang sah. Peruntutannya akan dibahas bersama DPRD Kota Bandung, tentunya untuk anggaran murni 2018 menutupi defisit," ujar Emil.

Emil menuturkan, saat dirinya dilantik jadi wali kota Bandung pada 16 September 2013, kasus korupsi bansos sudah bergulir.

Makanya untuk mencegah adanya kasus yang sama, ia membuat instrumen teknologi yang mampu mencegah tindak pidana korupsi melalui penyalahgunaan dana hibah maupun bansos. Aplikasi tersebut bernama Sabilulungan.

Melalui aplikasi ini, baik pemohon hibah maupun pemberi hibah, dalam hal ini pemerintah, bisa melakukan mekanisme pemberian bantuan secara transparan. Masyarakat juga bisa ikut memantau apabila salah satu pihak melakukan kekeliruan dalam penggunaan anggaran.

Emil mengatakan, aplikasi Sabilulungan ini telah mendapatkan apresiasi dari KPK yang menilai aplikasi ini mampu mencegah tindakan korupsi. Kini, KPK telah merekomendasikan Sabilulungan ke semua kota/kabupaten se-Indonesia.

Emil mengingatkan, kasus bansos harus menjadi pelajaran dan minta kepada PNS jangan main-main dengan anggaran. Uang rakyat harus kembali ke rakyat apalagi PNS Pemkot Bandung sudah disejahterakan. "Pendapatannya 2-3 kali lipat tahun ini. Sudah fokus saja bekerja," kata Emil. (tsm)